

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum*, (Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002).

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Malang: Sinar Grafika, 2017).

Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).

Anung Sugihantono, et al, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (revisi ke 5)*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2020).

Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Ditinjau dari Sudut Pandang HAN*, (Surakarta: Universitas Duta Bangsa, 2020).

Atik Purwandi, *Konsep Kebidanan Sejarah & Profesionalisme*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2008).

Bambang Wibowo, et al, *Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) Dalam Menghadapi Wabah COVID-19*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2020).

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Daru Lestantyo, dan Afrina, *Panduan Teknis Asesmen Risiko K3 Rumah Sakit dan Fasyankes Selama Masa Pandemi COVID-19*, (Jakarta: HSP Academy, 2020).

H. Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi, dkk, *Pandemi COVID-19 “Analisis Perencanaan”*.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka).

Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1979).

Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991).

Mills A, dkk, *Desentralisasi Sistem Kesehatan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991).

Mimin Emi, *Etika Keperawatan Aplikasi Pada Praktik*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2004).

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: UNS, 2003).

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Potter dan Perry, *Fundamental of Nursing / Fundamental Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2010).
- Rachman Haryadi, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Husbintek, 2020).
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: UNS, 2004).
- Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah RI, 2001).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. II, 2014).
- Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Sukendar dan Aris Prio Agus Santoso, *Tindak Pidana Dalam Praktek Keperawatan Mandiri (Perlindungan Hukum Bagi Perawat dan Pasien)*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2019).

Victor Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).

Yanuar Amin, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: PPSDM, 2017).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina dan Rumah Sakit Lapangan Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Semarang.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan COVID-19.

Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/278 Tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/355 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Semarang.

JURNAL

Gerardus Gegen dan Aris Prio Agus Santoso, Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 14, No. 2, Edisi November 2021.

M. Nur, Herawati, Aspek Hukum Keselamatan Kerja (K3) Bagi Tenaga Medis dan Kesehatan, *Majalah Hukum Nasional V Vol. 50 Nomor 2 Tahun 2020*, hlm. 165.

Sri Fheriyal, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3 Edisi 2, hlm. 1-6.

Yassir Arafat, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang, *Jurnal Rechtsens*, Vol. IV, No. 2 Edisi 2 Desember 2015, hlm. 34.

WEBSITE

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211101/5238774/pemerintah-tidak-akan-menarik-kelebihan-pembayaran-insentif-tenaga-kesehatan-covid-19/>

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200417/0533711/tingkatan-apd-bagi-tenaga-medis-saat-tangani-covid-19/>

<https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil>

<https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2022-06-16>

<https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>

WAWANCARA

Anggun Dessita Wandastuti, Epidemiolog Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang.